

*FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF
LOCAL GOVERNMENTS IN MERANGIN DISTRICT*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MERANGIN**

Oleh:

Rina Nurarifah¹⁾, Afrizal²⁾, Tona Aurora. L³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2022, Jambi – Indonesia

^{2&3)}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia

rinanurarifah95@gmail.com¹⁾, afrizaldoktor@unja.ac.id²⁾, tonalubis@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research is an analytical study and explain the Accountability variable relationship model, Transparency, Control System, Organizational Culture, Apparatus Competence and Regional Financial Management that affect Regional Government Financial Performance in Merangin District. The method used in this research is the Explanatory Survey. The criteria for selecting the sample are financial management officers in government. The sample of this research is 96 respondents. Data analysis was carried out using descriptive statistical analysis descriptive in the achievement of indicator criteria, and inferential statistical analysis using causality analysis. Structural Equation Modeling (SEM) based on 1component. The results showed that: Accountability have a positive effect on local government financial performance. Transparency has no positive effect on positive impact on local government financial performance. Internal control system does not have a positive influence on local government financial performance. Organizational Culture does not have a positive influence on local government financial performance. Apparatus Competence has a positive influence on local government financial performance. Regional Financial Management has a positive influence on local government financial performance.

Keywords: Accountability, transparency, internal control system, organizational culture, apparatus competence, regional financial management, regional government financial performance.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi analisis dan menjelaskan hubungan variabel Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian, Budaya Organisasi, Kompetensi Aparat dan Penganalaan Keuangan Daerah yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Survey Explanatory*. Kriteria pemilihan sampel adalah aparat pengelola keuangan di instansi pemerintahan di Kabupaten Merangin. Sampel penelitian ini adalah 188 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif berupa pencapaian kriteria indikator, dan analisis statistik inferensial menggunakan analisis kausalitas *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *component*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Transparansi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian internal tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Budaya Organisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompetensi Aparat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Kompetensi Aparat, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi (Jatmiko, 2017)

Berdasarkan prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2015, komposisi pendapatan daerah untuk provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia masih di dominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 55,93%, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 24,11% dan 19,96%. Hal ini mengindikasikan banyak daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan desentralisasi daerah belum optimal (Dewata et al., 2017)

Akuntabilitas kinerja berkaitan erat dengan sasaran strategis yang diharapkan dengan jumlah dana yang dialokasikan, jika dana yang dimiliki terbatas maka sasaran perlu diukur dengan tepat serta pengalokasian dana harus transparan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi.

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi disebut transparansi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Hehanussa, 2015)

Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat realisasi alokasi anggaran pemerintah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian tentunya didukung oleh PAD yang tinggi pula Julita, dkk (2012).

Kinerja pemerintahan kabupaten/ kota di Provinsi Jambi dinyatakan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada beberapa tahun terakhir. Salah satunya Kabupaten Merangin yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki, yaitu mengenai klasifikasi belanja dan klasifikasi barang milik daerah (BPK.go.id).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Kabupaten Merangin ialah mengenai rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, serta ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang masih tinggi. Sedangkan Kabupaten Merangin memiliki berbagai potensi alam yang dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu berupa tempat destinasi pariwisata berupa keindahan alam, baik area pegunungan dan sungai, serta perkebunan yang dapat menambah pundi-pundi keuangan daerah.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Daerah di Beberapa Kabupaten

No	Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer + Pinjaman	Rasio Kemandirian
1	Merangin	95.221.421.001,09	1.372.762.801.010,37	6,93 %
2	Kerinci	108.190.930.000,00	1.256.960.985.581,00	8,6 %
3	Sarolangun	118.828.593.871,64	1.067.495.697.374,80	11,1%
4	Muaru Bungo	153.250.017.630,37	1.692.498.673.105,39	8,9 %

Sumber: olahan output meranginkab.go.id

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan bersifat aktif, yang mengupayakan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Pengendalian internal diterapkan dalam rangka meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah kerugian atas asset, meningkatkan tingkat keandalan dan akurasi data dalam laporan keuangan serta mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan (Pujiono et al., 2016)

Berdasarkan UU No.12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah,

penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2018) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nasution, 2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh

signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronica Ireeuw et al., 2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, berarti semakin menurunnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah maka semakin menurun kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan faktor-faktor apa saja yang dapat merefleksikan pengaruh variabel endogen dan variabel eksogen serta melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya penelitian ini, pemerintah Kabupaten Merangin dapat meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki faktor-faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah yang belum optimal. Lokasi penelitian yang peneliti pilih ialah di seluruh organisasi perangkat daerah atau yang disingkat dengan OPD di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akuntabilitas mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin?
2. Bagaimanakah Transparansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin?
3. Bagaimanakah Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin?
4. Bagaimanakah Sistem pengendalian internal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin?
5. Bagaimanakah Kompetensi Aparat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin?
6. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah berdasarkan indikator pendukungnya.
3. Untuk menganalisis pengaruh Budaya organisasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan model penelitian, diperoleh hipotesis penelitian terdiri dari tujuh poin, yaitu:

- H1: Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- H2: Transparansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- H3: Sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah
- H4: Budaya Organisasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- H5: Kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- H6: Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Asas otonomi adalah suatu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, dan bertanggungjawab (Arifin, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 23 (pasal 2) tahun 2014, tentang pembagian wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada beberapa tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Setiap pemerintahan baik wilayah provinsi, daerah, maupun kabupaten/ kota memiliki wewenangnya sendiri untuk mengatur rumah tangganya dengan membuat peraturan daerah (Redaksi, 2017)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23, pasal 2, tahun 2014).

2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Agustina, 2018)

2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggung jawabkan hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik yaitu berupa penyampaian hasil kinerja keuangan kepada pihak yang memiliki kepentingan, sehingga dapat diketahui prestasi yang telah diraih oleh organisasi atau instansi tersebut (Ismiarti., 2013)

Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari pengoptimalan pengelolaan keuangan, serta penurunan penyimpangan yang terjadi dalam organisasi. Baik sumber-sumber penerimaan, jumlah penerimaan, maupun tujuan peruntukannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Haryanto, 2016)

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif, yudikatif, serta legislatif (Krina, 2003)

2.4. Transparansi

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang dimaksud dengan transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Prinsip transparansi berdasarkan yang dikemukakan (Werimon, S., Ghazali, I., & Nazir, 2007) terbagi menjadi dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan terpenuhinya hak masyarakat terhadap akses informasi. Komunikasi yang luas dengan masyarakat sangat diharapkan yang berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan.

2.5. Budaya Organisasi

Menurut (Kadafi, 2010), menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah perangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting dan sama-sama dimiliki oleh para anggota. Budaya memberikan pola cara-cara berfikir, merasa dan menanggapi, yang menuntun para peserta organisasi dalam mengambil keputusan dan dalam kegiatan-kegiatan organisasi lainnya.

Budaya merupakan cara khas berperilaku dan percaya bahwa sekelompok orang telah berkembang dari waktu ke waktu dan memiliki berbagai kesamaan Organisasi Budaya, khususnya, adalah perwujudan konkrit dari nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku karyawan dan membentuk cara sebuah organisasi beroperasi dan melakukan (Hoque et al., 2013, Tariq et al., 2016, 124).

2.6. Kompetensi Aparat

Kompetensi merupakan kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude). Indikator yang digunakan adalah penerahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku/ sikap (Sukarno et al., 2020)

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Adha Inapty & Martiningsih, 2016)

2.7. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

(Walsh & Seward, 1990) membagi pengendalian menjadi dua jenis, yaitu pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Pengendalian internal melibatkan semua orang yang terlibat dalam organisasi dari posisi terendah hingga tertinggi sedangkan pengendalian eksternal melibatkan orang di luar organisasi yang memiliki kepentingan atas organisasi tersebut. Baik pengendalian internal maupun eksternal memiliki peran yang sama penting bagi sebuah organisasi. Hal ini juga berkaitan dengan adanya tuntutan akuntabilitas yang wajib diberikan organisasi kepada stakeholder dan shareholder.

Pengendalian intern menurut Mulyadi (2012), adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang di bentuk untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal diharapkan setiap tugas dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2.8. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, sehingga dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat (Ruspina, 2013)

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 (Pasal 280, ayat 2), menyatakan bahwa kewajiban Penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi : a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. b. menyingkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD

dengan program pemerintah pusat. (Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Perubahannya)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey *explanator*, yaitu suatu metode yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian yang menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan fokus pada penjelasan hubungan antar variabel (Prof. Dr. Sugiyono, 2013) Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis deskriptif dan metode analisis inferensial. Analisis menggunakan PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model structural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*.

Pengujian *inner model* atau *structural* dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel laten, nilai signifikan dan *R-square* dari model penelitian. Model structural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan uji t signifikan dari koefisien parameter jalur structural. Menilai model dengan PLS dimulai dengan *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai *R-square* untuk digunakan dalam menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh substantive (Ghazali, 2015).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh dari pengolahan data primer berupa kuesioner yang tersebar di beberapa instansi pemerintahan Kabupaten Merangin. Penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel.2 berikut:

Tabel 2. Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang disebar	120	100%
2.	Kuesioner yang kembali	96	80%
3.	Kuesioner yang tidak kembali	24	20%
4.	Kuesioner yang diolah	96	80%

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Total kuesioner yang disebar adalah sebanyak 120 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 96 kuesioner (96% kuesioner kembali), sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 24 kuesioner (20%). Maka, kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 kuesioner.

4.1. Hasil Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) variabel laten. Variabel eksogen berupa variabel Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, variabel Budaya Organisasi, Kompetensi Aparat, variabel Pengelolaan Keuangan. Variabel endogen berupa variabel Kinerja Keuangan Pemerintah. Jumlah indikator dalam penelitian ini ialah 33 indikator.

4.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis data, Indikator variabel Akuntabilitas, yaitu kejujuran, jumlah skor indikator kejujuran adalah sebesar 292. Indikator kejujuran diperoleh nilai 74% yang artinya penerapan indikator kejujuran dalam akuntabilitas kinerja cukup baik. Indikator ketaatan hukum dan peraturan diperoleh nilai 84%, maka indikator tersebut dikategorikan baik. Selanjutnya indikator proses, progress, dan kebijakan masing-masing mendapat nilai 80%, 83%, dan 82%, dengan demikian ketiga indikator tersebut dikategorikan baik.

Pencapaian kriteria kinerja variabel transparansi, indikator pertama adalah Keterbukaan informasi, nilai capaian ialah sebesar 77% yang artinya kriteria tersebut tercapai dengan cukup baik. Indikator Fasilitas Publik merupakan indikator kedua dari Transparansi, hasil

perhitungan nilai persentase pencapaiannya sebesar 77% dimana kriteria tersebut sudah cukup baik. Selanjutnya pencapaian Pelaporan dan Penyebaran Informasi memiliki nilai sedikit lebih tinggi yaitu 78%, artinya kriteria ini tercapai dengan baik.

Sistem Pengendalian Internal (SPI), diantaranya adalah Lingkungan Pengendalian nilai persentase pencapaian kriteria sebesar 82% (Sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa keandalan informasi keuangan dipemerintahan telah berjalan dengan cukup baik. Indikator kedua ialah Penafsiran risiko, informasi serta komunikasi. Perhitungan indikator ketaatan hukum dari hasil jawaban responden mencapai 75% (cukup baik). Indikator ketiga adalah Kegiatan pengendalian, dimana perhitungan nilai indikator adalah 80% (baik). Indikator berikutnya adalah Pemantauan implementasi, mencapai nilai sebesar 78% (cukup baik).

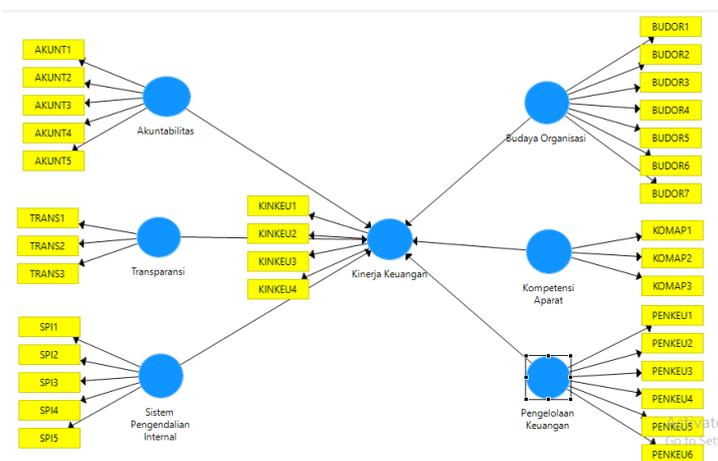
Kriteria indikator Budaya Organisasi adalah sebagai berikut, yaitu Indikator pertama adalah Inovasi yang memiliki nilai keseluruhan jawaban adalah 384, jumlah dari jawaban dikalikan dengan skor masing-masing. Persentase pencapaian kriteria Inovasi adalah 90%, dengan predikat Sangat baik. Selanjutnya indikator kedua adalah Perhatian sebesar 327 poin, dengan persentase 92% (Sangat baik). Indikator selanjutnya Orientasi Hasil dengan nilai persentase sebesar 90%. Indikator keempat Orientasi orang nilai persentase mencapai 74% dengan kategori baik. Indikator Orientasi Tim sebesar 86%, Indikator keenam ialah Agresifitas sebesar 87%, dan terakhir Indikator ketujuh adalah Kemantapan yaitu sebesar 84%. Maka, hasil perhitungan nilai pencapaian kriteria variabel Budaya organisasi memiliki hasil yang Baik dan Sangat baik.

Kompetensi aparat memiliki tiga indikator. Nilai capaian kriteria yang terbesar adalah Pengetahuan sebesar 83% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan indikator kedua adalah Kemampuan sebesar 81% (Baik), dan selanjutnya indikator ketiga Keterampilan sebesar 82% (Baik), dan indikator yang terakhir Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa semua indikator yang ada pada variabel Kompetensi Aparat di pemerintahan Kabupaten Merangin telah memenuhi kriteria yang di harapkan dengan predikat Baik dan Sangat Baik.

Indikator Pengelolaan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut : Kesesuaian dokumen sebesar 88%, kemudian Pengalolasian Anggaran Belanja sebesar 89%, Transparansi sebesar 89%, Penyerapan Anggaran sebesar 91%, Kondisi keuangan daerah sebesar 91%, dan yang terakhir Opini BPK sebesar 89%. Dari hasil perhitungan tersenut dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja dan Kondisi

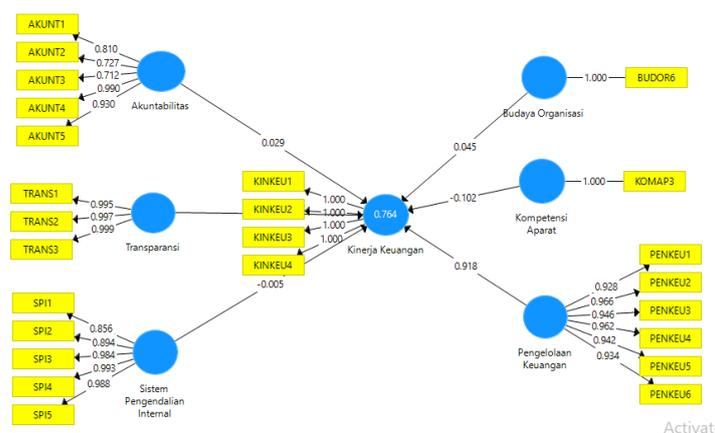
Keuangan Daerah memiliki nilai tertinggi yaitu 91% dengan pencapaian criteria sangat baik, dan criteria lainnya mencapai 88-89%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kabupaten Merangin telah mencapai kriteria yang diharapkan.

Variabel Kinerja Keuangan Daerah memiliki empat indikator, diantaranya yaitu indikator kemandirian, pencapaian target, pengeluaran dan penerimaan, serta efisiensi. Pencapaian kriteria dinyatakan dengan predikat baik dan cukup baik. Indikator Pencapaian targer dan indikator Efisiensi memperoleh nilai baik dengan persentase sebesar 84% dan 82%. Sedangkan indikator Kemandirian dan Pengeluaran dan penerimaan hanya memperoleh nilai cukup baik, dengan nilai capaian 77% dan 79%. Dari hasil perolehan nilai dalam pencapaian kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sudah cukup baik.



Sumber: olah data menggunakan SmartPLS

Gambar 1. Hasil Pengujian Measurement Model (Pengujian Indikator/ Outer Model)



Sumber: olah data menggunakan SmartPLS

Gambar 2. Hasil Perhitungan Model Kedua (PLS Algorithm)

Pengujian indikator dengan *Convergent validity* tidak hanya dapat dilihat dari nilai *loading factor* tetapi juga dapat menggunakan model ketiga berupa hasil

Average Variance Extracted (AVE) dan *Composite Reliability (CR)*.

Tabel 3: Average Variance Extracted (AVE) dan Composite Reliability (CR)

Variabel	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)	Reliabilitas Komposit	Keterangan
Akunt	0.750	0.936	Memenuhi Kriteria
Bud.Org	1.000	1.000	Memenuhi Kriteria
Kom.Ap	0.611	0.754	Memenuhi Kriteria
Kin.Keu	0.508	0.753	Memenuhi Kriteria
Pen.Keu	0.784	0.948	Memenuhi Kriteria
SPI	0.542	0.779	Memenuhi Kriteria
Trans	0.925	0.974	Memenuhi Kriteria

Sumber : hasil olah data menggunakan SmartPLS

4.1.2. Hasil Pengujian *Structural Model (Inner Model)*

Nilai terhadap structural model (*inner model*) dilakukan dengan melihat nilai *R-Square* sebagai hasil uji *goodness-fit* model. Besar Q^2 memiliki rentang nilai $0 < Q^2 < 1$ Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Solimun dan Rinaldo, 2009). Berikut nilai *R Square* dan *Adjusted Square* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. R Square dan Square Adjusted

	R Square	Adjusted R Square
Kinerja Keuangan Daerah	0.332	0.287

Sumber: hasil olah data SmartPLS

Nilai *R Square* variabel diperoleh dari output SmartPLS sebagaimana terlihat pada tabel, selanjutnya dapat dihitung nilai *Q Square* atau *predictive-relevance* dengan formulasi berikut:

$$Q^2 = 1 - (1 - 0.332^2)$$

$$Q^2 = 1 - (0.889^2)$$

$$Q^2 = 1 - 0.790$$

$$Q^2 = 0,21$$

Hasil pengujian menunjukkan nilai *predictive-relevance* sebesar 0,21 atau 21% memperlihatkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 21%. Hasil tersebut memiliki makna bahwa variabel kerja keuangan daerah dapat di refleksikan dari variabel akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern, budaya organisasi, kompetensi aparat, dan pengelolaan

keuangan daerah, sedangkan sisanya dapat di jelaskan oleh variabel lain.

4.1.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memiliki 6 (enam) hipotesis dengan pengaruh langsung (*direct effect*). Untuk melihat pengaruh langsung tersebut maka hipotesisnya dilakukan dengan melakukan *Bootstrapping*.

Fit_Model

	Model Saturated	Model Estimasi
SRMR	0.073	0.073
d_uls	1.360	1.360
d_G	Tidak digunak...	Tidak digunak...
Chi-Square	12523.301	12523.301
NFI	0.125	0.125

Sumber: olah data menggunakan SmartPLS

Gambar 3: Hasil Perhitungan (Bootstrapping) Model Kedua Penelitian

4.1.4. Hasil Pengujian Evaluasi *Inner Model (Structural Model)* : Uji Signifikansi Pengaruh Langsung (*Dirrect Effect*)

Pengaruh evaluasi *inner model* selanjutnya akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berupa signifikansi pengaruh langsung . *Inner model* atau pengukuran bagian dalam disebut dengan uji model structural. Tabel.5 menyajikan nilai koefisien jalur serta nilai *P-value* untuk pengujian signifikansi pengaruh langsung (*total effect*).

Tabel 5: Uji Signifikansi Pengaruh Langsung (Total Effect)

	Mean, STDEV, T-Values, P-Values	Keyakinan Interval	Keyakinan Interval Bias-Dikoreksi	Sampel	
	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sam...	Standar Devias...	T Statistik (O/...	P Values
Variabel Laten 1 -> Variabel Laten 3	0.664	0.712	0.315	2.104	0.036
Variabel Laten 2 -> Variabel Laten 3	-0.025	-0.019	0.084	0.298	0.766
Variabel Laten 4 -> Variabel Laten 3	-0.208	-0.215	0.092	2.259	0.024
Variabel Laten 5 -> Variabel Laten 3	0.212	0.232	0.103	2.048	0.041
Variabel Laten 6 -> Variabel Laten 3	-0.446	-0.471	0.272	1.643	0.101
Variabel Laten 7 -> Variabel Laten 3	0.137	0.120	0.367	0.375	0.708

Sumber: Diolah dari Output SmartPLS,2021

Hasil uji signifikansi pengaruh langsung (*total effect*) serta untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel laten penelitian ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh dapat signifikansi dapat diketahui dari kolom *t statistic* dan *P value*. Nilai T statistik > 1,95 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari masing-masing hipotesis. Nilai P value signifikan ditunjukkan oleh pengaruh variabel Kompetensi aparat terhadap Kinerja keuangan, dan pengaruh Pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja keuangan. Sedangkan variabel lainnya memiliki nilai P value diatas 0,05 sehingga nilai tersebut tidak memiliki signifikansi.

a. Pengujian Hipotesis I

Hipotesis Pertama dalam penelitian ini adalah “Akuntabilitas” berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian hipotesis pertama tersebut menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0.667 (positif) dengan *t-statistic* sebesar 2,104 < 1,96 serta nilai p value sebesar 0,036 > sig 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan daerah adalah 0,667 dan signifikan. Hal ini menunjukkan **terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama**. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua penelitian ini adalah “Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,025 dengan nilai *t-stat* 0,298 < 1,96 serta nilai p value sebesar 0,766 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,025 dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan **tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah “Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,446 dengan nilai *t-stat* 0,643 < 1,96 serta nilai p value sebesar 0,101 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,446 dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan **tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat penelitian ini adalah “Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis keempat menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,025 (positif) dengan nilai *t-stat* 0,298 < 1,96 serta nilai p value sebesar 0,766 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,025 dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan **tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

e. Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah “Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis kelima menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,208 dengan nilai *t-stat* 2,048 > 1,96 serta nilai p value sebesar 0,024 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,208 dan signifikan. Hal ini menunjukkan **terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi

aparatus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

f. Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan Keuangan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Pengujian hipotesis keenam menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,212 (positif) dengan nilai *t-stat* 2,0485 > 1,96 serta nilai *p value* sebesar 0,041 > sig 0,005. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Pemerintah pengaruh

terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,212 dan signifikan. Hal ini menunjukkan **terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya tersebut, maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis langsung sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung (Total Effect)

No	Hubungan Variabel	Hipotesis	Sampel Asli	T Statistik	P Value	Keputusan
1	AKUNT -> KINKEU	Positif	0.664	2.104	0.036	Hipotesis diterima
2	BUDOR -> KINKEU	Positif	-0.025	0.298	0.766	Hipotesis ditolak
3	KOMAP -> KINKEU	Positif	-0.208	2.259	0.024	Hipotesis diterima
4	PENKEU -> KINKEU	Positif	0.212	2.048	0.041	Hipotesis diterima
5	SPI -> KINKEU	Positif	-0.446	1.643	0.101	Hipotesis ditolak
6	TRANS -> KINKEU	Positif	0.237	0.375	0.708	Hipotesis ditolak

Sumber : Diolah dari Output SmartPLS,2021

4.2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel laten.

4.2.1. Outer Loading

Setelah di lakukan uji *outer model* pertama, diperoleh beberapa indikator yang tidak mencapai nilai 0,7, yaitu sebanyak 9 menguji penelitian ini adalah sebanyak 25 indikator, yang terdiri dari 5 (lima) indicator akuntabilitas, 3 (tiga) indicator transparansi, 5 (lima) indicator sistem pengendalian internal, 1 (satu) indicator budaya organisasi, 1 (satu) indicator kompetensi aparatus, 5 (enam) indicator pengelolaan keuangan, 4 (empat) indicator kinerja keuangan daerah.

Hasil pengujian *R-Square* dan *Square Adjusted*. menunjukkan bahwa variabel laten dapat dijelaskan dengan nilai Q^2 sebesar 0,21 (21%), maka dapat dikatakan bahwa indicator dapat merefleksikan variabel laten secara sebesar 21%, sedangkan sisanya di jeleskan oleh variabel lain. Berdasarkan hasil olah data.

4.2.2. Pengujian Inner Model (Structural Model)

Pengujian *Inner Model* dapat dilakukan dengan pengujian langsung (*Dirert Effet*) dan Pengujian tidak langsung (*Indirect Effect*), dalam penelitian ini hanya dilakukan pengujian langsung yaitu pengujian variabel endogen terhadap variabel eksogen. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini tidak ada variabel intervening yang menjadi perantara antara variabel endogen dan variabel eksogen. Hasil pengujian dapat dikatakan memiliki pengaruh apabila nilai T- statistik lebih besar dari 1,95. Berdasarkan pengujian terhadap variabel laten akuntabilitas, transparansi, sistem

pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi aparatus dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil bahwa variabel kompetensi aparatus dan pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai diatas 1,95.

Sedangkan variabel transparansi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi tidak mencapai nilai signifikansi 1,95. Nilai sign *P value* adalah variabel yang di uji harus memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 (*P value* < 0,05). Berdasarkan pengujian uji signifikansi langsung yang dilakukan terhadap variabel laten transparansi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, kompetensi aparatus, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas, kompetensi aparatus dan variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi lebih lebih kecil dari 0,05.

Sedangkan variabel transparansi, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Nilai *P value* variabel akuntabilitas sebesar 0,664, Kompetensi aparatus adalah sebesar 0,208 dan *P value* variabel Pengelolaan keuangan daerah adalah 0,212. Maka berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh langsung variabel Kompetensi Aparatus dan variabel Pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Merangin.

4.2.3. Hasil Uji Hipotesis

a. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji hipotesis mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan anatar variabel akuntabilitas terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah, yang di refleksikan oleh lima indikator. Indikator yang di uji adalah kejujuran, taat kepada hukum, proses, progress, dan kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Husaini, Lucy Aditya, 2013), dan (Nasution, 2018), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas, akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa Transparansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husaini, Lucy Aditya, 2013) (Nasution, 2018), dan (Firmansyah, 2018), (Firmansyah, 2018), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik transparansi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Merangin.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel Sistem pengendalian internal (SPI) yang di refleksikan oleh indikator keandalan informasi keuangan lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta penerapan implementasi. Berdasarkan pengujian dalam penelitian ini tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agus Aryaka Darmawan et al., 2020) dan Putu, Made, Anantawirakma (2016), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya peningkatan sistem pengendalian internal tidak memberikan peningkatan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa Budaya organisasi yang direfleksikan oleh tujuh indikator. Hanya indikator agresivitas yang member pengaruh langsung. Sedangkan indikator lainnya tidak memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Budaya organisasi merupakan salah satu variabel laten yang memiliki tujuh indikator. Namun, dari hasil uji *outer loading* terhadap keseluruhan indikator, inovasi memiliki nilai dibawah 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi belum memberikan dukungan bagi terciptanya budaya organisasi yang baik dilingkungan pemerintahan, khususnya pada divisi keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Morphology, n.d.), (Priagung et al., 2016), (Wahyuni & Rosmida, 2017), dan (Joseph & Kibera, 2019) yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh positif variabel budaya organisasi terhadap kinerja keuangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa budaya organisasi dilingkungan pemerintahan daerah tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

e. Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji hipotesis variabel kompetensi aparat terhadap kinerja keuangan daerah, diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kompetensi aparat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang direfleksikan oleh indikator perilaku. Pada awal pengujian, Indikator variabel kompetensi aparat terdiri dari empat indikator, dari empat indikator yang di uji, hanya satu indikator yang mencapai nilai *outer loading*, yaitu indikator perilaku. Sedangkan indikator lainnya yaitu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan memiliki nilai dibawah *outer loading*. Perilaku berkaitan dengan tingkah laku dan sikap aparat pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

f. Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan hasil pengaruh positif signifikan, dengan variabel pengelolaan keuangan direfleksikan oleh tujuh indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah Kesesuaian dokumen perencanaan, Pengalokasian anggaran belanja, Transparansi, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah, Opini BPK. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pujiono et al., 2016), dan (Nasution, 2018). Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Veronica Ireeuw et al., 2019), yang menyatakan tidak terdapat pengaruh pengelolaan keuangan pemerintah terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Transparansi yang dibuktikan dengan Keterbukaan Informasi, fasilitas publik, pelaporan dan penyebaran informasi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dibuktikan dengan Keandalan informasi keuangan, Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi, penafsiran risiko, Pemantauan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Budaya Organisasi yang dibuktikan dengan inovasi, perhatian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, agresivitas, dan kemandirian tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompetensi aparat dibuktikan dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap, mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat berdampak positif secara langsung dan signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berdampak positif secara langsung dan signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Saran

Saran bagi pemerintah Kabupaten Merangin. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin belum optimal, dapat dilihat dari pengaruh peningkatan hasil kinerja hanya di dukung oleh Pengelolaan keuangan dan Kompetensi aparat. Perlu dilakukan upaya optimalisasi dalam peningkatan akuntabilitas, transparansi, begitu pula budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, sehingga dapat terjadi peningkatan kinerja dengan dukungan berbagai faktor.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah. (2014). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 133.

Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1), 27–42. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3583>

Agus Aryaka Darmawan, I. P., Puja Wiryana Sanjaya, I. K., & Intan Saputra Rini, I. G. A. (2020). Pengelolaan Corporate Social Responsibility (Csr) Internal Berdasarkan Persepsi Karyawan Hotel Bintang Lima Di Wilayah Kuta. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.2.1854.63-72>

Agustina, L. R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Universitas Islam Negeri*, 1080.

Arifin, M. Z. (2019). Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Dewata, E., Ilmiyah, N. M., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>

Firmansyah, D. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal Edisi Xxiv Januari s/d Maret 2018*, 4(001), 165–177.

Halim A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Haryanto. (2016). Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 111–124.

Hehanussa, S. J. (2015). kutip 1 (Salomi J. Hehanussa). *Conference in Busniess, Accounting and Management*, 2, 82–90.

Husaini, Lucy Aditya, L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Akuntansi Dan Manajemen*, Volume 3,(1), 21–41.

Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. *Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu*.

Jatmiko, R. D. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Usaha Kecil. *Journal of Management and Business Review*, 11(1), 40–45. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v11i1.55>

Joseph, O. O., & Kibera, F. (2019). Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance Institutions in Kenya. *SAGE Open*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019835934>

Kadafi, M. (2010). Pentingnya Kerjasama Tim dan

- Orientasi Hasil Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Eksis*, 6(2), 1521–1525.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Morphology, T. C. Analisis Struktur Kovarian.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Priagung, D., Sinoeraya, E., & Mafudi, M. (2016). Pengaruh Penyerapan Anggaran, Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Keuangan Organisasi Publik (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). *Al-Tijary*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21093/at.v2i1.536>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provins. *Bisnis, Jurnal Vol, Manajemen*, 10(1), 68–81.
- Redaksi, T. (2017). *Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (D. Hannie (ed.)). Bhuana Ilmu Populer.
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, September, 1–27.
- Sukarno, S. A., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. J. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>
- Veronica Ireeuw, S. M., Allo Layuk, P. K., & Rante, A. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 87–99.
- Wahyuni, E. S., & Rosmida, R. (2017). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Locus Of Control Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v5i1.165>
- Walsh, J. P., & Seward, J. K. (1990). On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms. *Academy of Management Review*, 15(3), 421–458. <https://doi.org/10.5465/amr.1990.4308826>
- Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X Di Makassar*.